

Pengaruh Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2008-2022

Novi Theresia Sinaga¹, Darwin Hartono^{2*}

^{1,2}Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

¹sinaganovi29@gmail.com, ²darwinhartono.state@gmail.com

Abstract

Received: 14 Nov 2025

Revised: 17 Dec 2025

Accepted: 05 Jan 2026

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk analisa pengaruh antara tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Bali periode tahun 2008 hingga 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif pendekatan kuantitatif kausal. Secara simultan variabel pengangguran terbuka dan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Secara parsial, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif signifikan.

Keywords: kemiskinan, pengangguran terbuka, upah minimum, Bali

(*) Corresponding Author: darwinhartono.state@gmail.com

INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Lebih dari 700 juta orang, atau 10 persen dari populasi global, masih hidup dalam kemiskinan ekstrem dan masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan akses ke air bersih. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang bermula pada ketidakmampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan akan berakibat terbaikannya kebutuhan yang lainnya sehingga sulit mencapai kehidupan layak (Budiarti & Hartono, 2023).

Pengangguran dapat memicu kemiskinan dikarenakan situasi tersebut dapat mengurangi pendapatan seseorang yang mengakibatkan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup (Hartono et al., 2023). Pengangguran tidak hanya mencakup individu yang belum mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mencakup mereka yang sedang mencari atau melamar pekerjaan. Selain itu, orang yang sudah bekerja pun dapat dianggap sebagai penganggur jika pekerjaannya tidak memberikan nilai ekonomi yang memadai. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia dapat menjadi penyebab umum pengangguran. Tingkat pengangguran mencerminkan interaksi kompleks antara faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Selain dari itu, hal lain yang dapat memicu kemiskinan adalah kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah, yang terdiri dari gaji pokok dan

tunjangan tetap yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Ngarifun & Hartono, 2022). Tingkat upah yang rendah dapat menjadi penyebab tingkat kemiskinan dikarenakan pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan layak dengan upah rendah tersebut.

Pada umumnya, apabila pengangguran meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat dan apabila upah meningkat maka kemiskinan akan menurun. Tetapi yang terjadi di Provinsi Bali pada periode tahun 2008 hingga 2022, tingkat kemiskinan meningkat padahal pengangguran menurun, dan upah meningkat.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (*poverty*) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan selalu berhubungan dengan penurunan dan kerentanan karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Menurut Sukirno (2019), pengangguran merupakan suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sedangkan tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah penganggur atau pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang disebutkan dalam bentuk persentase. Pengangguran merupakan permasalahan makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat yang terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi. Bila ditetapkan di kabupaten atau kota dikenal dengan istilah upah minimum kabupaten atau kota. Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya.

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2011), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Adapun sumber data diperoleh dari data resmi dari instansi terkait, diantaranya berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Data yang digunakan diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran terbuka dan upah minimum Provinsi Bali tahun 2008 hingga 2022. Dengan analisa tersebut, persamaan fungsi liniernya sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Pengangguran Terbuka}_{it} + \beta_2 \text{Upah Minimum}_{it}$$

Dimana:

Y_{it}	= Kemiskinan Provinsi Bali
α	= konstanta Kemiskinan Provinsi Bali
β_1	= koefisien regresi Pengangguran Terbuka Provinsi Bali
Pengangguran Terbuka it	= Pengangguran Terbuka Provinsi Bali
β_2	= koefisien regresi Upah Minimum Provinsi Bali
Upah Minimum it	= Upah Minimum Provinsi Bali

Dalam model regresi yang terbentuk telah memenuhi kriteria BLUE sehingga dapat digunakan sebagai estimator terpercaya dan handal dan dapat dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Dengan demikian data telah terdistribusi normal, tidak ada gejala multikolinieritas, tidak ada gejala *heteroskedastisitas*, dan tidak ada gejala *autokorelasi*.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Adapun hasil regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-statistik	Sig
Konstanta	4,823	14,187	0,000
PNGRN	0,207	2,876	0,014
UPAH	-5,006	-3,247	0,007
Adj R Square	0,579		
F-Statistik	10,609		
Sig F-Statistik	0,002		

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas , diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KMSKN = 4.823 + 207 \text{ PNGRN} - 5.006E.007 \text{ UPAH}$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 4,823, bermakna jika variabel independen tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum tetap tidak berubah atau sama dengan 0, maka kemiskinan akan meningkat 4,823 satuan. Adapun pengaruh pengangguran dan upah minimum dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien regresi variabel pengangguran terbuka positif sebesar 0,207. Hal ini berartikan dengan asumsi *ceteris paribus*, apabila pengangguran terbuka mengalami kenaikan satu satuan maka kemiskinan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,207 satuan.
- Nilai koefisien regresi variabel upah minimum negatif sebesar -5.006. Hal ini berartikan dengan asumsi *ceteris paribus*, apabila upah minimum mengalami kenaikan 1 satuan maka menurunkan kemiskinan sebesar 5,006 satuan dan begitu sebaliknya.

Berdasarkan tabel 1, hasil *adjusted R square* sebesar 0,579 atau 57,9 persen. Hal ini menunjukkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengangguran terbuka dan upah minimum mampu mendeterminasi variabel dependen tingkat kemiskinan sebesar 57,9 persen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil *adjusted R square* sebesar 57,9 persen menunjukkan hubungan kedua variabel independen dan variabel dependen kuat.

Berdasarkan tabel 1, nilai F hitung sebesar 10,609 lebih besar dari nilai F tabel (0,05;2;12) sebesar 3,89 dengan probabilitas 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara simultan variabel pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap variabel kemiskinan.

Berdasarkan tabel 1, nilai t hitung variabel pengangguran terbuka sebesar 2,876 lebih besar dari pada t tabel (0,05;12) sebesar 2,178 dengan signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Nilai T hitung variabel upah minimum sebesar -3.247 lebih besar dari pada t tabel (0,05;12) sebesar 2,178 dengan signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Discussion

Hasil pengujian data menunjukan bahwa variabel pengangguran terbuka dan upah minimum secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh antara lain oleh (Netri et al., 2023) menunjukan bahwa tingkat pengangguran dan upah minimum secara bersama sama memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Kondisi ini bisa terjadi karena penetapan upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan pengangguran terbuka. Hal ini terjadi karena banyaknya perusahaan yang tidak dapat mempertahankan jumlah pekerja dengan upah tinggi, sehingga beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja yang dipekerjakan yang berdampak pada jumlah pengangguran terbuka ikut meningkat. Selaras dengan itu, pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan. Maka jika upah minimum meningkat dapat menyebabkan pengangguran terbuka tinggi, karena perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan atau tidak

dapat mempertahankan jumlah pekerja yang karena tingginya upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan bertambahnya pengangguran terbuka maka semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dengan begitu kemiskinan pun meningkat.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Adam (2022) dan Utami & Udjianto (2023) yang secara empiris menunjukkan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka kemiskinan juga akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Menurut Nurkse kemiskinan berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan atau *vicious circle of poverty*. Dalam teori lingkaran setan kemiskinan disebutkan bahwa rendahnya produktivitas disebabkan adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan, serta kurangnya modal. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Hartono et al., (2024). Upah minimum merupakan usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik sehingga terbebas dari kemiskinan. Peran pekerja, buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menetapkan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan Industrial sehingga dicapai tujuan bersama yaitu pekerja atau buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik. Menurut Sumarsono (2009), tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja *working age population*. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Upah merupakan salah satu alat motivator untuk meningkatkan produktivitas kerja karena upah merupakan imbalan yang akan diterima seseorang setelah bekerja, makin tinggi upah akan membuat karyawan meningkat produktivitas kerjanya. Upah yang dimaksud disini adalah balas jasa yang berupa uang atau jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok minimum lainnya.

CONCLUSION

Secara simultan variabel tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap angka tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2010 hingga 2018. Secara parsial, variabel pengangguran terbuka berpengaruh positif

signifikan terhadap kemiskinan. Variabel upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

REFERENCES

- Adam, D., Oliligo, F., Santoso, I. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Bali Dalam Angka. Bali: Badan Pusat Statistik.
- Budiarti, P., & Hartono, D. (2023). The Effect of Economic Growth and Investment on Poverty West Java Province in 2004-2019. *Literatus: Literature for social impact and cultural studies*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.37010/lit.v5i1.826>
- Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics (4th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Hartono, D., Tampubolon, E. G., & Irvan, M. (2023). Pengaruh Pembangunan dan Pemberdayaan Gender serta Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(4), 373–382. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v9i4.17160>
- Hartono, D., Tampubolon, E. G., & Irvan, M. (2024). Peran Upah Minimum Dalam Mediasi Hubungan Kausal Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Maluku Tahun 2005-2023. 11(2), 51–61. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v11i2.27698>
- Netri, N. N., Kawung, G. M. ., & Siwu, H. F. D. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 97–108.
- Ngarifun, & Hartono, D. (2022). Upah Dan Harga Konsumen Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2002-2019. *Sosio E-Kons*, 14(3), 240–245. https://doi.org/https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/14189
- Sumarsono. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo . *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), Maret 2022.
- Sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. In Bandung Alf (hal. 143).
- Utami, D., Udjianto, D. (2023). Analisi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 2 (7).